

Judul : Komisi I dukung pemerintah perketat verifikasi Merchant, deposit judol QRIS capai Rp 12 T
Tanggal : Jumat, 07 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Deposit Judol Pakai QRIS Capai Rp 12 T

Komisi I Dukung Pemerintah Perketat Verifikasi Merchant

SENAYAN meminta Pemerintah memberantas tuntas judol online (judol). Tidak hanya berfokus memblokir situs, tapi juga memutus aliran dana operasional jaringan yang makin liar.

Anggota Komisi I DPR Junico Siahaan mengatakan, pengawasan terhadap transaksi digital harus diperkuat. Pasalnya, para pelaku kini memanfaatkan QRIS sebagai sarana deposit judol.

Dia mengatakan, Pemerintah tidak boleh sekadar menghilung jumlah situs yang berhasil diblokir Aparat Penegak Hukum (APH). Selama aliran dana, rekening penampung, serta pinjaman daring (pinjol) ilegal masih tersedia bebas, jaringan judol akan terus berubah bentuk dan beroperasi menyasar masyarakat, khususnya golongan rentan.

Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan, 88,6 persen frekuensi deposit judol pada triwulan I 2026 dilakukan melalui QRIS. "Sedangkan transaksi melalui transfer bank dan dompet digital turun jadi 11,4 persen dari total aktivitas deposit," terang legislator yang karib disapa Nico itu, Rabu (5/8/2026).

Dia bilang, perubahan pola itu jadi tantangan baru yang harus segera direspons melalui koordinasi lintas lembaga. Demi keamanan bersama, kolaborasi harus melibatkan Kementerian

Komunikasi Digital (Komdigi), PPATK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Polri, serta seluruh pihak penyelenggara sistem pembayaran digital.

Perubahan pola melalui skema QRIS itu juga dimanfaatkan bandar dengan menawarkan deposit bernilai kecil. Bahkan, ada yang nilainya Rp 5.000. Kemudahan transaksi itu membuat akses terhadap perjudian daring makin terbuka lebar. Akibatnya, potensi membahayakan kelompok masyarakat rentan termasuk anak-anak semakin besar.

Nominal deposit sangat kecil, kata Nico, bisa menurunkan hambatan psikologis masyarakat untuk mulai mencoba bermain judol. "Nilainya memang kecil. Tapi jika transaksi dilakukan berkali-kali setiap hari, uang makan, sekolah, kesehatan, serta kebutuhan keluarga yang lainnya juga bisa dihabiskan oleh pemain judol," ucapnya.

Kata dia, catatan PPATK menunjukkan perputaran dana judol sepanjang 2025 mencapai angka Rp 286,84 triliun dengan 422,1 juta frekuensi transaksi. Adapun pada triwulan I 2026, perputaran dana telah mencapai Rp 40,3 triliun. Dengan nilai total deposit di sistem keuangan nasional sebesar Rp 10,59 triliun.

Namun, meski nilai perputaran uang menurun dibanding 2024, peningkatan frekuensi transaksi justru menunjukkan makin luas-



Junico Siahaan

nya akses masyarakat terhadap kegiatan ilegal itu. Makanya, Pemerintah tidak boleh merasa bahwa persoalan telah selesai. Sebab melonjaknya frekuensi transaksi dan mengerjinya nominal deposit justru lebih memudahkan masyarakat menjangkau judol.

Apalagi data Komdigi mencatat hampir 200 ribu anak Indonesia terpapar judol. Itu termasuk sekitar 80 ribu anak berusia di bawah 10 tahun. Kondisi itu tentunya jadi peringatan serius bahwa ini bukan lagi sebatas pelanggaran hukum. "Ini sudah jadi ancaman sosial perusak masa depan bangsa," ujarnya.

Karena itu, dia mendorong Pemerintah membangun sistem pertukaran data lintas lembaga secara *real time*, memperketat verifikasi *merchant* QRIS, serta menindak rekening penampung

judol. Selain itu, penegak hukum harus memutus keterkaitan judol dan pinjol ilegal dengan menindak bandar, menghentikan promosi, serta melacak aset.

Langkah Komdigi memutus akses 3,7 juta situs judol sejak Oktober 2024 patut diapresiasi. Namun, pemberantasan itu tidak akan efektif jika hanya mengandalkan pemblokiran situs. "Makanya negara harus hadir memutus aliran dana dan ekosistem kejahatan sebelum rekening masyarakat terkuras serta keluarga terjerat utang," tegasnya.

Sebelumnya, laporan PPATK mengungkap QRIS banyak dimanfaatkan oleh jaringan judol dengan nilai deposit Semester I 2026 mencapai Rp 12,36 triliun. Dengan nilai nominal yang fantastis itu, QRIS tercatat sebagai kanal pembayaran dengan porsi terbesar jika dibandingkan metode transaksi lain yang ada saat ini.

Kepala PPATK Ivan Yustianadana menegaskan, temuan itu jadi peringatan agar pesatnya adopsi pembayaran digital diimbangi pengawasan ketat. Penguatan tata kelola *merchant* dan pemantauan transaksi harus terus dilakukan. Agar masyarakat tetap aman menggunakan QRIS, dan di saat yang sama jaringan judol kehilangan akses ke sistem.

Data PPATK menunjukkan total deposit judol mencapai Rp 22,05 triliun selama Januari hingga Juni

2026, dengan Rp 12,36 triliun atau 56,04 persen lewat QRIS. Frekuensinya mencapai 198,77 juta transaksi atau 87,66 persen. Sisanya berasal dari bank dan dompet elektronik sebesar Rp 9,69 triliun.

Kata Ivan, tingginya transaksi lewat QRIS bukan berarti instrumen itu bermasalah. QRIS tetap jadi sarana pembayaran resmi pendukung transaksi digital masyarakat serta pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). "Persoalan utama terletak pada penyalahgunaan identitas *merchant* dan tujuan transaksi oleh jaringan judol," jelasnya.

Langkah utama yang dibutuhkan, lanjutnya, bukan dengan membatasi penggunaan QRIS di tengah masyarakat, melainkan memperkuat proses verifikasi *merchant* penerima. Selain itu, otoritas harus meningkatkan pengawasan terhadap pola transaksi mencurigakan serta menindak tegas pihak-pihak yang memanfaatkan sistem pembayaran digital untuk aktivitas ilegal.

Dia juga mengimbau masyarakat untuk tetap menggunakan QRIS secara bijak. Dengan memastikan nama *merchant*, nominal pembayaran, dan tujuan transaksi sebelum membayar. "Ini untuk menjaga instrumen digital itu tetap aman dari kejahatan, terlebih QRIS merupakan sarana pendukung ekonomi masyarakat serta UMKM," pungkasnya. ■ PYB